

**MASALAH SOSIAL DAN KONFLIK MASYARAKAT ADAT PAPUA
DENGAN PT FREEPORT INDONESIA**
(Tinjauan Antropologis)

Nita Safitri

Departemen Antropologi, FISIP Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Prolonged conflict between the indigenous people of Papua and PT. Freeport Indonesia should receive serious attention from the government. Not only casualties property but also be a “thorn in the flesh” in the way of national and state, because this conflict into the international spotlight and influence overseas investor for security reason that are not guaranteed. The conflict has taken approximately 40 years old, there must be something wrong in the stage of completion. Settlement with guns and violence is not the right solution even sharpen the conflict even during the year 2009 has been approximately 50 times the clash of indigenous Papuans with PT. Freeport Indonesia and the government until 2010 even clashes are still on going. Need cultural wisdom in seeing social problems and attention to policy and development culture that framed the conflict can be ended.

Keywords: social issues, development, and conflict.

PENDAHULUAN

Pengertian siapa dan dimana masyarakat adat berada belumlah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat luas. Sering terjadi salah paham jika kita mengkaji identitas masyarakat adat, yang ada dalam bayangan kita adalah sekelompok kecil masyarakat, penduduk asli suatu negara, orang-orang pinggiran yang hidup di hutan, padang pasir, atau daerah kutub, masyarakat yang tertindas atau mereka yang mempunyai budaya berbeda dengan masyarakat umum disekelilingnya (IWGIA, 2001). Fakta di atas ada benarnya, tetapi saat ini sangat rumit sekali menentukan siapa yang disebut masyarakat adat. Banyak negara yang tidak mengakui keberadaan masyarakat adat di negaranya umumnya di Afrika dan Asia. Tetapi ada negara yang mengakui keberadaan masyarakat adat tetapi mereka tetap menjadi masyarakat yang terpinggirkan.

Perjalanan sejarah membuktikan bahwa masyarakat adat dibanyak negara menjadi warga negara kelas dua, hak-hak mereka diabaikan, tanah mereka dirampas atas nama pembangunan dan mereka mengalami marginalisasi baik secara sosial budaya, ekonomi dan politik. Kasus orang *Yanomami* di lembah Sungai Amazone (Brazilia dan Venezuela) wilayahnya diporak porandakan oleh para penjajah dan penambang emas sehingga mereka tersingkir dari tanah leluhur mereka. Atau kasus masyarakat *suku Jhumma dan Chittagong Hill Tract* yang tidak diakui oleh pemerintah Bangladesh, akibatnya mereka terusir dari tanah enomereka. Masyarakat *adat suku Karen di Birma* yang mengalami pemusnahan secara sistimatis (*genocide*) oleh rezim militer Birma. Kasus di Indonesia *suku Amungme dan suku Komoro* terjajah akibat kehadiran PT Freefort Indonesia yang disingkirkan akibat tanah hutan merupakan sumber penghidupan mereka untuk proyek pertambangan diambil dengan paksa.

Fenomena munculnya konflik akibat pembangunan di Indonesia diawali sejak tahun 1990 an, dimana masyarakat melakukan protes dan demonstrasi kepada pemerintah atau proyek tertentu di lokasi tertentu. Mulai dari pedagang kaki lima yang tergusur karena pembangunan mall mewah, nelayan yang memprotes pukut harimau, kasus penebangan hutan dan pemalak liar, sampai tuntutan pejabat yang korupsi dan sebagainya. Protes biasanya berkesinambungan mulai dari perencanaan proyek, biasanya ganti rugi yang tidak adil bagi tanah, lahan atau rumah yang tergusur. Jika proyek telah berjalan, protes muncul karena dampak yang ditimbulkannya misalnya merusak lingkungan, kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang mengalami.

Kasus masyarakat adat di Papua khususnya suku Amungme dan Komoro yang berkonflik dengan PT FI sudah berlangsung sejak lama kurang lebih 40 tahun sejak tahun 1969, yang memakan korban nyawa, harta benda, tanah lahan baik dipihak masyarakat adat maupun pihak karyawan PT FI, pegawai pemerintah, ABRI maupun pihak kepolisian. Dapat dikatakan konflik sudah bersifat akut dan merupakan masalah sosial berdampak multidimensional.

Beberapa penelitian yang telah pernah dilakukan menunjukkan bahwa proyek pembangunan menimbulkan dampak yang cukup luas bagi masyarakat:

1. Perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya mempengaruhi pola mata pencaharianm, pekerjaan dan hubungan sosial.
2. Peningkatan ketegangan sosial akibat perubahan-perubahan yang terlalu cepat.
3. Timbulnya konflik antar kelompok, antar generasi, antar rakyat dengan pemerintah sehingga terjadi disharmoni dalam masyarakat.

4. Timbulnya kesenjangan sosial terutama antara penduduk asli dengan pendatang.
5. Adanya keinginan keinginan ekonomi karena ganti rugi yang tidak memadai.
6. Munculnya ketidak pastian hidup, terutama bagi yang tergusur.
7. Gangguan psikologis dan stres, akibat tekanan masalah sosial (Sariyun. 1996, Suparlan, 1998, Adi, 2002).

Menurut Suharto (2007 : 71-72) masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut,

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang dalam hal ini tidak ada batasan berapa jumlah orang yang merasakan.
2. Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan.
3. Kondisi yang menuntut penyelesaian.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif.

Dikaitkan dengan konteks masyarakat Papua yang ada saat ini dengan karakteristik masalah yang diuraikan di atas sangat relevan. Konflik masyarakat adat Papua dengan PT FI penyebab dan akibatnya sudah bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang dan pihak asing sebagai investor. Dari beberapa penelitian yang ada menyangkut suatu proyek mempunyai dampak sosial yang luas, seperti berupa perubahan budaya, nilai nilai tradisi, perubahan mata perncaharian, kesenjangan sosial, perampasan hak adat (terutama tanah) dan marjinalisasi masyarakat adat (Ngadisah, 2002). PT FI membuat perubahan perubahan yang sangat cepat sehingga tidak mudah bagi masyarakat lokal/adat segera beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Tulisan ini mencoba melihat kasus ini dari perspektif Antropologis, harus

dipahami paradigma pendekatan tidak semata mata berupa pembangunan fisik yang segera dapat mensejahteraan suatu komunitas masyarakat, tetapi pendekatan kemanusiaan diiringi dengan menghargai wujud kebudayaan berupa sistim budaya, sistim sosial dan hasil karya mereka. Resistensi yang dilakukan masyarakat adat karena mereka tidak diajak berpartisipasi dan tidak ada penghargaan yang diberikan oleh PT FI dan pemerintah justru menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar. Pendekatan budaya dan pembangunan sosial perlu dipertimbangkan untuk merangkul mereka dan mengakhiri konflik yang berkepanjangan.

PEMBAHASAN

PT Freeport Indonesia Sebagai Sumber Konflik

Lokasi Pertambangan

Terletak di puncak gunung Ensberg dengan luas sekitar 100 km persegi. Sebelum PT FI beroperasi diwilayah tersebut kondisi di daerah tersebut sangat sulit dijangkau dan sekitarnya sudah ada perkampungan kecil yang tidak merata. Penduduknya berjumlah sekitar 1000 orang terutama berasal dari suku Amungne dan suku Kamoro. Bagi kedua suku ini kehidupan mereka tidak dapat dipisahkan dari tanah hutan yang mempunyai nilai budaya yang oleh masyarakat adat dianggap sebagai ibu yang melahirkan dan memberikan kehidupan sehingga mereka dapat mempertahankan kehidupan dan melanjutkan keturunan. Puncak gunung Ensberg diibaratkan kepala ibu (*ninggok*) yang dianggap suci dan sakral.

Tanah juga mempunyai nilai religius sangat tinggi bagi masyarakat adat, jika mereka sakit atau demam cukup menggosokkan tanah berlumpur kesekujur tubuh mereka dan penyakitnya secara perlahan lahan berangsur sembuh. Hutan dengan segala isinya memenuhi keperluan

mereka mulai dari sebagai sumber makanan, pakaian, dan papan juga tempat berhubungan dengan Tuhannya. Begitu pentingnya nilai alam bagi mereka dan sangat arif mengelola dan memanfaatkannya dan kehidupan mereka harmonis dengan alam. Terbukti alam terjaga dan lestari (IWGIA , 2001 : 107).

Kedamaian dan keharmonisan masyarakat adat di Papua ini mulai terusik pada tahun 1968. Ketika itu kontrak karya I antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport McMoran Amerika ditanda tangani pada tanggal 7 April 1969, mulailah PT FI beroperasi. Sejak awal pertambangan ini melahirkan protes oleh masyarakat adat dengan memancangkan tombak dan anak panah dilokasi pertambangan di gunung Ensberg dan komplek perumahan di Tembagapura sebagai simbol penolakan mereka.

Resistensi Masyarakat Adat Papua terhadap PT. FI

Sentimen sentimen Masyarakat Adat terhadap Orang Asing

Koentjaraningrat (1982 : 365-369) memprediksi sekitar lebih kurang 30 tahun yang lalu, jika pemerintah Indonesia tidak mengambil kebijakan yang tepat dan memuaskan bagi masyarakat Irian Jaya (sekarang Papua), masalah sosial akan muncul dan menjadi "PR" bagi pemerintah Indonesia. Prediksi ini menjadi kenyataan, sampai saat ini bumi Cendrawasih itu tetap terjadi konflik secara permanen semenjak ia terintegasi dengan Republik Indonesia tahun 1963 sampai saat ini tahun 2009.

Perjalanan sejarah yang panjang sejak penjajahan kolonial Belanda dan keinginan untuk mempunyai pemerintahan sendiri mempertajam ketidaksukaan masyarakat Papua terhadap orang asing atau non Papua. Meskipun secara defakto tahun 1963 Irian Jaya bergabung dengan Indonesia, tetapi secara kebudayaan belum menyatu. Masyarakat Papua sebenarnya

tidak pernah merasa bagian dari negara kesatuan RI, dimana mereka tidak mengakui perjanjian antara pemerintah Belanda yang menyerahkan jajahan mereka Hindia Belanda kepada Republik Indonesia. Mereka tidak pernah merasa menjadi jajahan Belanda tetapi lebih cenderung bergabung dengan wilayah kepulauan Melanesia Pasifik Selatan.

Meskipun begitu Belanda berusaha dengan segala cara agar Papua jangan bergabung dengan Indonesia mengingat kekayaan alam Papua sangat menjanjikan. Belanda mencekoki penduduk Papua dengan gagasan Papua merdeka yang dipimpin oleh warga Papua sendiri. Mereka telah mempunyai bendera sendiri, dan lagu kebangsaan yang berjudul Hai Tanah Papua. Cita cita ini masih bergaung gemanya sampai sekarang dan mengilhami banyak orang Papua sampai saat ini.

Perlakuan yang tidak adil dan kelakuan para pendatang yang ditugaskan ke Papua membuat ketidaksenangan masyarakat terhadap orang non Papua bertambah mendalam dan keinginan melepaskan diri dari RI menjadi jadi. Pemberontakan pertama masyarakat Papua tanggal 26 Juli 1965 oleh serdadu Batalion Papua dan rentetannya melahirkan organisasi yang menuntut Papua Merdeka dan oleh pemerintah Indonesia disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang saat itu dipimpin oleh almarhum Kelly Kwalik.

Konflik terus terjadi secara insidental, mahasiswa Universitas Cendrawasih dan para nasionalis Papua mengkonsolidasikan diri dan mengajukan meminta pendapat rakyat sehubungan bergabungnya Papua ke Republik Indonesia. Pada tahun 1969 sesuai dengan perjanjian New York referendum dilaksanakan di Indonesia dibawah pengawasan PBB. Hasilnya adalah Papua tetap bergabung ke ibu Pertiwi. Bagi para nasionalis Papua yang tidak puas mereka menyatakan pada tanggal 1 Juli 1971

secara resmi diproklamkanlah Papua Merdeka oleh Nicolas Yoose, dan Seth Yafeth Rumkorim di Kecamatan Waris sekaligus memproklamkan bendera, lagu kebangsaan dan lainnya (Kompas, 25 Juli 2009).

Meskipun belum ada bukti resmi, secara tidak langsung konflik konflik yang muncul di Papua oleh pemerintah Indonesia dicurigai ditopang oleh para anggota OPM termasuk konflik dengan PT FI.

Gerakan Kebatinan atau *Cargo Cult* di Papua

Wilayah kepulauan di lautan Teduh bagian barat, Melanesia, kepulauan Fiji, Papua dan Papua Newgini mempunyai kesamaan fenomena mengenai gerakan kebatinan yang disebut *Cargo cult*. Pengertian *cargo cult* sendiri adalah muatan dari kapal besar yang berarti barang mewah yang dipunyai umumnya oleh orang kulit putih.

Barang barang ini suatu saat akan mereka nikmati saat datangnya seorang "ratu adil" yang memimpin masyarakat dan berasal dari golongan atau keturunan mereka. Gerakan ini juga berarti gerakan yang menentang pergantian zaman yang dimaknai memusuhi orang kulit putih dan orang-orang non Papua (Indonesia lainnya). Menurut Koentjaraningrat (1982 : 90-92) ciri-ciri *Cargo cult* antara lain:

- Semua pemimpin gerakan ini mengaku sebagai pesuruh Tuhan atau nabi.
- Dalam menjalani upacara upacara adanya tarian tarian dan nyanyian bersama.
- Mereka mempercayai suatu akan datang ratu adil yang membawa mereka kepada kebahagiaan hidup.
- Gerakan ini mengandung banyak kepada kepercayaan kepada ilmu gaib dan ilmu perdukunan.

- Dalam gerakan ini diajarkan rasa benci terhadap lapisan atas dan kulit putih yang dulunya menjajah mereka.

Dapat dipahami dari tingkat sistem budaya pemikiran, gagasan dan ide dari gerakan ini tidak pernah mati. Terbukti puluhan tahun kemudian inti dari gerakan *cargo cult* tetap hidup tentu dengan versi berbeda sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat Papua. Jika ditarik pada konflik dengan PT FI perlawanan mereka memang mempunyai akar budaya yang telah diwariskan secara turun menurun. Dampak yang mereka alami semakin memperkokoh perlawanan yang dilakukan sampai saat ini. Data terakhir menyebutkan sepanjang tahun 2009 insiden kekerasan di Papua memuncak pada bulan Juli setelah pemilihan Legislatif bulan April 2009. Pada tanggal 8 Juli 2009 terjadi penembakan terhadap karyawan PT FI dan menewaskan Drew Nicolas Grant warga Australia dan tanggal 15 Juli 2009 terjadi penembakan anggota Brimob di Timika. Demo besar-besaran terjadi ketika Kelly Kwalik ditembak oleh aparat kepolisian pada tanggal 16 Desember 2009 karena dianggap sebagai provokator pembunuhan karyawan PT FI.

Jika dirunut kebelakang, kebijakan pemerintah sejak awal keberadaan PT FI dimana masyarakat adat tidak dilibatkan. Dalam praktek pembangunan, dimana usaha pengelolaan pembangunan masyarakat paling tidak mensyaratkan empat hal (Abdullah, 2007),

1. Usaha itu mengharuskan pengenalan karakter yang khas secara seksama sehingga pendekatan yang digunakan dapat sejalan dengan sifat-sifat masyarakat. Banyak kegagalan pembangunannya bersumber dari pengabaian

- karakter setempat sehingga pembangunan menjadi suatu proses intervensi luar yang kerap kali menimbulkan resistensi.
2. Usaha pengelolaan pembangunan masyarakat itu mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat yang bersangkutan karena masyarakat memiliki preferensi dalam berbagai bentuknya.
 3. Upaya pengelolaan pembangunan masyarakat mensyaratkan adanya suatu pembelaan terhadap status marginal, khususnya dominasi pusat atau negara dimana yang marginal mempunyai posisi tawar menawar.
 4. Pengembangan masyarakat mensyaratkan pemanfaatan sumber daya dan kekuatan dari dalam untuk proses perubahan. Selain untuk menjamin partisipasi lokal yang sebesar besarnya dalam proses pembangunan pemanfaatan sumber daya dan kekuatan dari dalam akan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam mengkaji masyarakat adat di Papua adalah hambatan kultural. Di dalam sistem kultural yang berisi norma, ide, dan gagasan, peraturan apabila tidak dipahami sebagai integrasi berbagai kepentingan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dapat menjadi penghambat pembangunan sebagai tujuan bersama. Budaya masyarakat adat itu perlu dipahami, dikenali, dan kemudian nilai apa yang perlu diinternalisasi kedalam kehidupan masyarakat hingga konflik

antara masyarakat adat dan PT FI dan pemerintah tidak perlu terjadi. Hambatan kultural dapat juga berupa perbedaan nilai yang berbeda-beda dalam menginterpretasikan berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, akibatnya apa yang dilihat dari setting yang berbeda akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Umpamanya nilai tanah bagi masyarakat adat Papua mungkin berbeda dengan nilai yang dipahami oleh pemerintah dan PT FI. Hal ini apabila tidak terpecahkan dengan komunikasi lintas kultural dan institusi sudah barang tentu akan berakibat menghambat pembangunan itu sendiri.

Faktor lain yang dapat dianggap sebagai penghambat pembangunan adalah skala prioritas dalam kebijakan yang ditetapkan oleh negara menimbulkan ketimpangan dimana pejabat kebijakan lebih mementingkan pembangunan ekonomi dibandingkan dengan pembangunan non ekonomi. Kejadian krisis ekonomi tahun 1998 menunjukkan adagium bahwa pembangunan ekonomi yang maju akan menyebabkan sektor lain dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat tidak terbukti. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibangun dari utang luar negeri ambruk karena tidak mempunyai fondasi yang kuat, dan hanya dikontrol dan dinikmati oleh segelintir orang (Perkins, 2004)

Dampak Keberadaan PT. FI di Papua Terhadap Lingkungan Hidup

Menurut catatan Walhi (1997) hampir 30 tahun kerusakan alam yang ditimbulkan karena proyek pembangunan PT FI meluluhlantakkan tanah dan hutan Papua. Pembangunan pabrik di puncak gunung Ensberg dan pembangunan rumah karyawan di Tembaga pura dan pabrik di Kuala Kencana memerlukan tanah sekitar 100 ha. Bisa dibayangkan kerusakan yang terjadi dengan pengrusakan tanah dan

hutan dan perumahan penduduk. Setelah pertambangan beroperasi limbah dari total biji besi yang diolah hanya 3 persen yang dapat diolah menjadi konsentrat, kandungan tembaga emas dan perak sisanya 97 persen dibuang ke sungai sungai berupa lumpur halus yang semakin lama mempengaruhi kualitas air sungai yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat Papua.

Tanah masyarakat adat yang ditimbun atau *tailing* dilakukan penebangan hutan dan pengerukan tanah yang digunakan PT FI memperluas fasilitas perusahaan. Luas hutan yang telah ditimbun 56.001 ha dan daerah aliran sungai juga tercemar tailing. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Sungai (BPDS) Mamberamo Ir, Karyono MP bahwa kerusakan sungai sungai yang ada di Papua sudah berada pada tingkat yang mengkuatirkan, dan kerusakan hutan diperkirakan mencapai 5 juta ha dan 3 juta berada dalam keadaan kritis (Kompas, 7 September 2009). Kerusakan lingkungan tanah hutan pada akhirnya juga menurunkan kualitas hidup masyarakat adat.

Terjadinya Pelanggaran HAM di Papua

Potensi konflik biasanya yang terjadi di dunia dan termasuk di Indonesia dimulai dari perebutan sumber sumber daya dan sumber rezeki. Jika perebutan yang terjadi berjalan dengan sesuai aturan main yang mereka anggap adil , maka tidak akan terjadi konflik sosial diantara mereka. Dalam hal ini masyarakat adat konflik dengan PT FI merasa diperlakukan tidak adil dan kaitannya dengan tanah dan kehormatan yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Masyarakat adat memahami bahwa mereka tidak akan dapat memenangkan konflik terhadap PT FI yang didukung oleh pemerintah dan aparat keamanan. Perlawanan yang dilakukan mereka bersifat *gerilya* dan bersifat insidental.

Tetapi aparat keamanan dalam hal ini polisi sering melakukan dengan kekerasan yang berlebihan, Bahkan tentara ABRI pun ikut terjun memberantas perlawanan masyarakat adat ini. Peristiwa pemboman yang dilakukan tahun 1977 di lembah Baliem mendapat kecaman dari dunia Internasional.

Banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT FI dengan perpanjangan tangan pemerintah ABRI dan kepolisian membuat ketua adat Tom Beanal melalui organisasi adat memprotes ke Komnas HAM di Jakarta bahkan meminta anggota DPR menjadi tim pencari fakta. Meskipun usaha untuk mengatasi konflik telah dilakukan faktanya sampai sekarang konflik tidak juga berhenti. Ada kecurigaan dari masyarakat bahwa konflik sengaja diciptakan karena orang berkepentingan dengan adanya konflik. Usman Hamid dari LSM Kontras menyatakan konflik di Papua merupakan lahan bahan rebutan antara ABRI dengan kepolisian karena ada uang keamanan yang cukup menggiurkan.

Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

Mata pencaharian masyarakat adat sebelum adanya PT FI adalah memangkur sagu, menangkap ikan, kerang dan kepiting di sungai sungai, rawa rawa dan ditepi pantai. Selain itu juga meramu hasil hutan, berburu dan menjerat babi hutan dan burung serta berkebun. Hutan ditebangi biasanya ditanami pisang, ubi kayu, ubi manis, keladi , pepaya dan tembakau. Begitu tanaman tumbuh, masyarakat adat meninggalkan kebunnya. Mereka datang lagi ketika pantas hasilnya dipanen, biasanya kebun ini berlokasi ditepi tepi sungai atau daerah yang kering dan tidak berpayu. Oleh karena itu mereka membangun rumah tidak jauh dari kebunnya atau dari tepi pantai. Hidup dari sagu sebagai makanan pokok, ikan sebagai lauknya dan sekali kali memakan hasil

kebun mengakibatkan mereka secara tetap dan terus menerus melakukan perpindahan dari hulu sungai (tempat memangkur sagu) ke muara sungai (tempat menangkap ikan) dan kebun-kebun mereka (antara hulu dan muara sungai). (Beanal, 1999)

Rutinitas kehidupan yang tenang berubah seketika disebabkan PT FI melakukan penambangan emas dan tembaga dan kota pelabuhan pertambangan Timika. Perusahaan ini semakin berkembang membawa dampak datangnya pendatang-pendatang spontan dari luar Timika, bersamaan dengan itu masuklah sistem ekonomi uang ke dalam kehidupan masyarakat adat. Terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat adat (suku Kamoro) yang harus dipenuhi seperti halnya kaum pendatang. Sementara kemampuan produktif mereka untuk dapat dipasarkan secara relatif sama dengan kemampuan sebelumnya (Suparlan, 1998: 42).

Penimbunan tanah tailing juga menyebabkan masyarakat adat kehilangan sumber penghidupan mereka dan sementara mereka yang tanahnya ditimbun diberi tempat tinggal sementara di sebelah barat Timika. Hal inilah yang menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat adat yang terbiasa hidup berpindah-pindah. Jadilah mereka penonton kemewahan yang terlihat di depan mata khususnya karyawan PT FI mempunyai pekerjaan memadai, perumahan lengkap dan gaya hidup tertutup. Sementara akibat perubahan mata pencarian mereka tidak memadai, pengalaman-pengalaman menghadapi orang luar yang dianggap merampas ketenangan hidup selama ini, akibatnya stres menimpa mereka. Umumnya mereka melarikan diri meminum alkohol atau *pemabokan*.

Terjadinya Berbagai Konflik dan Kepentingan

Demikian rumitnya persoalan keberadaan PT FI karena banyaknya keterlibatan kepentingan-kepentingan baik itu individu maupun institusi nasional maupun internasional. Berbagai konflik yang terjadi sejak berdirinya PT FI dan pada tahun 1972 konflik menyebabkan beberapa karyawan PT FI terbunuh. Untuk menanggapi tuntutan masyarakat adat Amungme dan Komoro, PT FI melakukan perjanjian yang disebut *Januari Agreement*. Untuk itu PT FI ditentukan kewajibannya menyediakan sekolah, memberi beasiswa dan pelayanan kesehatan masyarakat adat.

Pada tahun 1974 masyarakat adat sekitar proyek melakukan perjanjian dengan PT FI tentang batas yang jelas untuk lahan pertambangan dan tidak memasuki wilayah tanah adat. Pada masa itu tanah perbatasan dibuat pagar kawat untuk kota Tembapapura. Ternyata fakta dilapangan menurut ketua adat Amungme PT FI melanggar perjanjian yang disepakati. Kota Tembapapura diperluas menjadi 20 ha untuk kepentingan perumahan karyawan dan pembukaan lahan baru untuk kepentingan perluasan di camp 50 dan 59 dan tanah adat kembali diserobot. (Beanal, 2000).

Konflik berlanjut dengan protes masyarakat adat, dan dibalas aparat keamanan dengan membom kampung kampung suku Amungme, kampung Sikal (lembah Baliem) dan lain-lain pada tahun 1977. Perlawanan insidental tetap berlanjut dan kerusakan terbesar terjadi pada Bulan Januari tahun 1996 menewaskan puluhan orang baik masyarakat adat maupun aparat keamanan. Kerusakan ini mendapat perhatian dari LSM nasional dan Internasional (Amerika) yang meminta pemerintah segera menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu Ornop menganggap keuntungan yang amat besar dari bumi Papua dengan produksi 230.000 ton biji dengan total cadangan sekitar 2,5-3 milyar

ton tetapi masyarakat sekitarnya hidup sangat sederhana.

Tanggapan datang dari PT FI dengan mengeluarkan kebijakan *dana satu persen* pada bulan Juli 1996. Dana itu diambil dari laba kotor perusahaan yang jumlahnya setiap tahun meningkat sesuai dengan kapasitas produksi PT FI. Dana ini oleh PT FI disebut *Freefort Fund for Irian Jaya Development (FFIJD)*. Penggunaan dana satu persen ini sejak awal menimbulkan kontroversi. Status dana menimbulkan masalah dan konflik karena berbagai pihak yang terkait menafsirkannya sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Menurut PT FI dana digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua umumnya dan masyarakat suku Amungme khususnya yang tanahnya terkena proyek pertambangan PT FI. Diantaranya pemanfaatan untuk pengembangan sumber daya manusia, khususnya pendidikan, pelatihan ketrampilan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Meskipun secara yuridis formal sudah disepakati antara PT FI dengan masyarakat adat, tetapi tetap terjadi perseteruan diantara mereka yang merasa berhak mendapatkannya antara lain:

1. Masyarakat Adat dari suku Amungme, merasa paling berhak karena tanah merekalah yang paling banyak dipakai oleh PT FI untuk areal pertambangan dan perumahan karyawan.
2. Tokoh tokoh dan suku suku lain yang aktif dalam kerusuhan tahun 1996, meanggap bahwa dana satu persen itu keluar berkat "perjuangan mereka" dan itu adah *uang darah* dan mereka berhak mendapat bagian dari dana itu.
3. Agar dana satu persen ini terjaga distribusinya PTFI

bekerja sama dengan pemerintah propinsi Papua. Melalui SK Gubernur no 352 tahun 1996 dibentuk Anggota Tim Unit Koordinasi Proyek (UKP) dan Tim Unit Pelaksana Proyek (UPP) proyek pengembangan Wilayah Terpadu Timika (PWT2). Kedua lembaga ini bermitra dengan dengan tujuh yayasan setempat yang mewakili suku suku disekitar pertambangan. Ke tujuh yayasan tersebut dibentuk atas dasar swadaya masyarakat dan pemerintah hanya sebagai motivator. Ternyata dilapangan yang mewakili ketujuh suku suku tersebut bukan kepala sukunya tetapi anggota anggota kerusuhan 1996, akhirnya kondisi ini mendorong dibentuk anak anak yayasan dengan harapan dapat mengelola dana 1 % tersebut.

4. Akibat semberawutnya pengelolaan dana satu persen dan tidak tepat sasaran dan disinyalir yang menikmati dana tersebut adalah elit suku dan tidak berdampak banyak terhadap masyarakat luas, maka PT FI mengadakan kesepakatan baru dengan pemerintah daerah. Mekanisme perencanaan program dan pengelolaan dana dituangkan dalam buku pedoman acuan LPM -IRJA dan bersifat indenpenden. Tetapi praktek dilapangan kontriversi dan kecurigaan tetap terjadi.

Dampak keterangan di atas terjadinya perebutan dana dan mengundang konflik antar suku, dengan pemerintah dan antara LPM dengan PT FI dan tokoh tokoh 1996 merasa paling berhak mendapat dana satu persen.

Terjadinya Cultural Shock

Terhadap Penduduk

Masuknya PT FI kewilayah masyarakat adat membawa perubahan kehidupan sosial budaya mereka. Seperti yang diuraikan di atas tanah bagi masyarakat adat adalah sumber kehidupan, pretise kelompok klen yang dipimpin kepala suku mempunyai dan mempunyai nilai religius. Konsekwensinya jika mereka dipaksa pindah untuk dimukimkan didaerah daerah baru dengan alasan untuk proyek pembangunan, atau alasan kesehatan lingkungan dan sanitasi yang lebih baik, mereka enggan angkat kaki. Kalau tidak dipaksakan untuk pindah mereka kembali ketempat asal. (Suparlan, 1998).

Alasan diatas memang sulit diterima, tetapi kita memahami nilai nilai budaya dalam kerangka berpikir masyarakat adat, dimana ada semacam kerinduan jiwa yang telah menyatu dengan kehidupan mereka. Dalam religi adat orang Papua konsep pemukiman yang baru adalah sesuatu yang sulit diantisipasi dan penuh misteri. Alasan klasiknya arwah arwah leluhur bukan milik kliennya. Apabila lingkungan fisik itu digunakan tanpa memperhatikan ekosistim budaya setempat dikuatirkan mendatangkan *cultural shock* atau stress bagi mereka. (Revassi, 1990 : 234).

Perubahan yang cepat dan perbedaan yang sangat mencolok akibat masuknya PT FI, membuat masyarakat belum siap menerima perubahan itu. Salah satu dampaknya yaitu adanya gangguan psikologis, seperti depresi, stres dengan beralihnya mata pencaharian dan adaptasi tempat baru. Tidak saja menghadapi perubahan kehidupan mereka sehari hari ditambah lagi ketakutan mereka terhadap kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Banyak dari mereka yang lari ke hutan dan pelarian inilah yang dianggap pemerintah dan ABRI sebagai anggota

OPM yang memang sudah bergerak secara latent dikawasan tersebut dibawah pimpinan almarhum Kelly Kwalik (Lenusa, 1999). Menariknya Kwalik dianggap pemberontak oleh pemerintah Indonesia, tetapi dianggap pahlawan bagi sebagian masyarakat Papua.

Puncaknya ketika 10.000 ribu masyarakat adat Papua mengungsi ke Papua Newgini karena kekecewaan dan ketakutan menimpa mereka. Tokoh karismatik dan seniman Papua Arnold Ap dibunuh oleh satu regu Kopassus pada tanggal 26 Januari 1984. Belum lagi agitasi dan intimidasi dari sayap sayap politik dan militer OPM. Jadilah mereka menjadi pengungsi di kamp kamp di Kiunga, Vanimo, Daru dan East Aswin (Kompas, 29 November 2009). Konflik semangkin memuncak di akhir tahun 2009 ketika pimpinan OPM Kelly Kwalik ditembak polisi dalm suatu penyergapan pada tanggal 16 Desember 2009 yang dituduh menjadi provakator dalam beberapa kasus penembakan diareal PT FI. Untuk itu para pemimpin adat yang mewaliki 200 suku yang ada di Papua menuntut DPRD Timika menuntut dialog internasional untuk membahas status intregasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik (NKRI) dipenuhi sekali gus dan Dewan Adat Papua mengumumkan tuntutan penutupan PT FI (Kompas, 30 Desember 2009).

Menghadapi persoalan persoalan di atas, masyarakat Papua yang terdidik dan tentunya dibantu oleh pihak pihak tertentu mengadakan resistensi tertentu kepada PT FI dan pemerintah. Tulisan Ngadisah (2002) mengemukakan ada beberapa strategi yang digunakan masyarakat Papua tetap relevan digunakan sampai saat ini:

(1) Strategi Kekerasan

Strategi ini telah dilakukan masyarakat sejak persiapan berdirinya PT FI. Mereka mulai membongkar hutan dan memasang pagar pagar pembatas. Sebelumnya masyarakat adat dari suku

Amungme yang paling parah terkena dampaknya mengadukan persoalan ini pada pemerintah lokal, mulai dari camat Bupati sampai pada anggota DPRP Fakfak. Perlawanan masyarakat adat dijawab oleh pasukan ABRI dan kepolisian dengan melakukan kekerasan terhadap masyarakat Papua mulai dari penculikan, penyiksaan, dipenjara tanpa proses hukum dan diperkosa. Mengingat pada masa Orde baru PT FI adakah salah satu perusahaan anak emas mantan Presiden Soeharto.

(2) Strategi Kelembagaan

Masyarakat adat menyadari bahwasanya dengan melakukan perlawanan dengan kekerasan tidaklah maksimal mengingat tidak seimbangny kekuatan mereka dengan PT FI yang ditopang oleh pemerintah. Oleh sebab itu strategi kelembagaan harus ditempuh dengan harapan institusi ini sebagai ujung tombak dalam berhadapan antar institusi dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang dihormati oleh masyarakat. Seorang kepala suku dari suku Amungme bernama Tom Beanal mendeklarasikan organisasi yang disebut Lembaga Adat Suku Amungme (Lemasa) pada tanggal 22 Juni 1992. Keberadaan kepala suku yang dihormati berhasil menyatukan persepsi masyarakat Amungme tentang strategi perjuangan yang ingin dicapai dan cara cara pencapaiannya (Balridge, 1975 : 114).

Organisasi ini mempunyai visi dan misi yang jelas yang intinya sebagai wadah mengangkat derajat suku Amungme dan masyarakat adat lainnya yang berdiam sekitar daerah Amungme. Tujuan lain yang ingin dicapai melalui lembaga adat ini meningkatkan kehidupan budaya, ekonomi sosial dan politik, agar mereka dianggap setara dengan suku suku lainnya di Indonesia.

(3) Strategi Politik

Melalui lembaga Adat Lemasa, masyarakat Amungme melakukan komunikasi politik dengan badan badan

resmi baik pemerintah nasional bahkan internasional. Mereka mempublikasikan melalui brosur, seminar, kajian dan penerbitan buku yang berisi pembelaan dan dukungan terhadap Lemasa. Arah perjuangan yang tadinya berkisar pada perjuangan kesejahteraan dan hak hak suku Amungme di Timika bergeser kearah perjuangan politik masyarakat pada secara umum. Bahkan Tom Beanal bahkan berani bertindak atas nama Lemasa melakukan gugatan terhadap PT FI melalui instansi pengadilan di Amerika Serikat asal pemegang saham PT FI.

Langkah perjuangan politik diranah nasional juga ditempuh Lemasa dengan tuntutan untuk melakukan penyidikan pelanggaran pelanggaran HAM yang dilakukakan ABRI dalam mengatasi konflik di Papua. Lemasa mengundang Tim penyidik dari Komnas HAM, dan tim pencari fakta DPR RI. Melalui Persekutuan Gereja, Lembaga adat ini juga mengusulkan kepada pemerintah Indonesia mengadakan *dialog nasional* dan salah satu materi dialog tentang kebebasan berpolitik bagi masyarakat Papua yang tujuannya adalah untuk kemerdekaan Papua Barat (Lenusa, 1999). Melalui strategi politik organisasi Lemasa memperluas skala perjuangan yang tadinya pada lingkup sempit kesejahteraan suku Amungme menjadi perjuangan masyarakat Papua umumnya.

Berbagai dampak di atas dapat diminimalisasi kalau sejak awal pemerintah dan PT FI menyiapkan perencanaan sosial sebagai kunci dalam kebijakan pembangunan yang berkerangka budaya. Perencanaan teknis tidak cukup menampung aspek aspek sosial, karena perencanaan teknis lebih menekankan pada aspek fisik dan finansial ketimbang aspek manusianya. PT FI mencirikan perusahaan yang merupakan manifestasi dari sistim ekonomi kapitalistik yang modern dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan globalisasi. Penelitian Ngadisah (2002

:67) memperlihatkan masyarakat adat papua dipaksa *terjun* kedalam sistim baru secara langsung tanpa persiapan dan perencanaan sama sekali. Kurangnya kesiapan masyarakat adat untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi melahirkan dua sikap yang berbeda. *Pertama*, menanggapi perubahan itu dengan beradaptasi dan bekerja keras, *kedua*, cenderung melarikan diri dan melakukan perlawanan dengan kekerasan.

Tantangan lain yang cukup rentan dihadapi masyarakat Papua adalah meningkatnya kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan organisasi sosial, atau tradisi yang mempengaruhi sikap dan pola perilaku masyarakat. Aspek sosial sering diabaikan dalam perencanaan pembangunan, dan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat harus disiapkan lebih dulu sehingga mampu berpartisipasi pada setiap tahap pembangunan itu sendiri.

Abdullah (2007: 8) mengemukakan dengan pendekatan merangkul masyarakat memegang peranan yang sangat strategis. Dengan mendayagunakan masyarakat setempat dan melibatkan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, perumusan program, pengelolaan dan evaluasi sampai akhir program sehingga menimbulkan rasa *sense of belonging* terhadap apa yang telah dibangun. Khusus bagi masyarakat adat Papua keberadaan PT FI dapat diterima dengan hati terbuka jika memberi nilai tambah dalam kehidupan mereka dalam arti luas dan dihargai tanpa kehilangan orientasi nilai dan jati diri mereka .

SIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan seyogyanya memperhatikan manusia sebagai subjek secara holistik termasuk masyarakat adat dan lingkungannya, dan menggunakan kajian sosial yang memadai untuk menyiapkan mereka terlebih dahulu untuk menerima perubahan sosial sehingga proses akulturasi berjalan dengan mulus. Pembangunan berkerangka budaya salah

satu alternatif penting dalam mengkaji masyarakat adat dan konflik internal maupun konflik eksternal yang dihadapi mereka sehubungan dengan pembangunan proyek. Proyek juga harus memberikan nilai tambah bagi penduduk lokal dalam berbagai aspek kehidupan dan mereka bukan hanya menjadi penonton yang tidak memperoleh apapun bahkan kesengsaraan yang mereka peroleh.

Kebuntuan dalam menyelesaikan konflik diperlukan orang atau organisasi yang dipercayai dua pihak yang bertikai. Kalau masalah sosial ini tidak di atasi dengan segera, jangan heran resistensi masyarakat adat akan terus berlangsung seperti yang terjadi sampai saat ini. Momentum memperingati hari hak hak bangsa pribumi atau adat ke 15 tahun sejak dicetuskan tanggal 9 Agustus 1994 dan kasus penyelesaian masyarakat Papua merupakan tonggak awal untuk memperbaiki citra Republik Indonesia di dunia Internasional saat ini dan sekaligus menjadi ajang uji coba keberhasilan langkah awal Presiden SBY sebagai presiden terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2002 Pembangunan Sosial dan Pembangunan yang Berpusat Pada Manusia, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP- UI , Vol 1 No 1 September 2002.
- Abdullah, Irwan 2007, Pembangunan Manusia, Filosofi & Pembangunan Manusia yang Bermartabat , Jurnal Populasi , No 18 Januari 2007. Yogyakarta: Buletin PPK UGM.
- Baldrige, J Sociologi A Critical Approach to Power, Conflict and Change, Jhon Willey and Sons Inc, New York.
- Beanal, Lidya M, 1999 Arti Tanah Menurut Suku Amungme, Forum Lorenz.

- Berry, Jhon W dkk , 1999 Psikologi Lintas Budaya Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama., Jakarta.
- IWGIA- Dayakologi , 2001 Masyarakat Adat, Eksistensi dan Perjuangannya, Penerbit Gramedia , Jakarta.
- Kaisiepo, Manuel 2007 Memahami Konflik dan Disharmoni Sosial di Papua Makalah pada Lokakarya Memperingati 50 Tahun Antropologi UI, 11-12 Desember 2007 Kampus UI Depok.
- Koentjaraningrat, 1981 Pengantar Ilmu Antropologi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1990 Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Penerbit Djambatan Jakarta.
- Kompas, 21 Juli , 2009.
- Kompas, 7 September 2009.
- Kompas, 29 November 2009.
- Lenusa, F.E, 1999 “Profil Lembaga Adat Suku Amungme pada Masyarakat Amungme” Skripsi Sarjanana IIP Jakarta (Tidak diterbitkan).
- Ngadisah, 2002 Gerakan Sosial di Kabupaten Mimika: Studi kasus Konflik Pembangunan Proyek Pertambangan Freeport, Jurnal Sosiologi Masyarakat, FISIP- UI Edisi 10 2002.
- Perkins, Jhon, 2004 Confessions of an Economic Hit Man Berret Koehler Publisher Inc San Francisco CA, USA.
- Revassi, Lazarus, 1993 , Perspektif Kepemimpinan di Pedesaan Irian Jaya antara Mitos dan Realitas, Jurnal Ilmu Politik no 7 Penerbit, Kerjasama LIPI dan PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Suharto, Edi 2007 Kebijakan Sosial sebagai kebijakan Publik Penerbit Alfabeta, Bandung
- Suparlan, Supardi 2006, Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya. Jurnal Antropologi Indonesia FISIP UI, Vol 30 No 2 Tahun 2006.
- Suparlan, Parsudi 1998 Kesukubangsaan dan Primordialitas : Program Ayam di Desa Mwapi Timika Irian Jaya, Jurnal Antropologi Indonesia No 54 thn XXI FISIP UI Jakarta
- Suparlan, Parsudi , 1981 Perubahan Lingkungan Sosial karena Pembangunan dalam Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Vol 1 no 1 Juni 1981.